

ABSTRAK

Riza Fahmi (1225010169) : Sejarah Konflik Agrarian Masyarakat Badega (Garut) Tahun 1984-2016.

Konflik agraria di Badega, Kabupaten Garut, merupakan konflik pertanahan yang berlangsung dalam kurun waktu yang cukup Panjang, berawal dari tahun 1984 hingga 2016. Konflik ini melibatkan masyarakat Badega, PT Surya Andaka Mustika (PT SAM), dan pemerintah akibat perbedaan klaim atas penguasaan lahan. Dan pemberian HaK Guna Usaha (HGU) dari pemerintah kepada PT SAM yang mengakibatkan pertentangan pandangan demi satu sumber daya Agraria yang pasti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah munculnya konflik agraria di Badega, bagaimana kemudian konflik itu terjadi. menganalisis dinamika konflik yang terjadi selama tahun 1984–2016, dari mulai Sejarah munculnya Konflik, bentuk-bentuk konflik sampai respon Masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, serta mengkaji proses penyelesaian dan resolusi konflik. Hingga pada pelaksanaan program reforma Agraria.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan arsip, dokumen pemerintah, buku, jurnal ilmiah, serta proses wawancara yang berlangsung. Data kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif berdasarkan kronologi peristiwa dan perkembangan konflik. Setelah pengumpulan data masuk ketahap kritik, ada kritik intern dan juga ekstern, lalu tahap interpretasi dengan menggunakan teori structural sartono kartodirdjo, sampai pada tahap terakhir yaitu historiografi ataupun tahap oenulisan Sejarah.

Hasil penelitian tersebut kiranya terakumulasi pada satu Kesimpulan bahwa konflik bermula dari pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT SAM sebagai bentuk kebijakan pemerintah demi keberlangsungan ekonomi negara, namun pemberian HGU kepada PT SAM tepat berada di atas lahan yang telah lama dikelola masyarakat. Konflik berkembang melalui berbagai bentuk perlawanan masyarakat, advokasi organisasi masyarakat sipil, serta upaya penyelesaian melalui jalur hukum dan kebijakan pemerintah. Dinamika konflik dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pertanahan dan tuntutan reforma agraria.